

SKRIPSI
PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
DAN DAMPAKNYA PADA KINERJA KEUANGAN PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH PEMERINTAH
KOTA MAKSSAR

DEVI APRILIYANTI
105730420113



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR

2017

**PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
DAN DAMPAKNYA PADA KINERJA KEUANGAN PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH PEMERINTAH
KOTA MAKSSAR**

**DEVI APRILIYANTI
105730420113**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S1) pada Jurusan Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kota Makassar.

Nama Mahasiswa : Devi Apriliyanti

No. Stambuk : 105730420113

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyampaikan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan disajikan dengan panitia penguji skripsi Strata (SI) pada tanggal 14 Oktober 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 Oktober 2017

Menyetujui,

Pembimbing I

Drs. H. Sanusi A. M., SE., M.Si
NIDN : 0027035501

Pembimbing II

Muttiarni, SE., M.Si
NIDN : 0930087503

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis



Ismail Rasulong, SE., NIM

NBM: 903078

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badollahi, SE., M.Si, Ak.Ca

NBM: 1073428

HALAMAN PEGESAIAN

Skripsi atas nama **Devi Apriliyanti** dengan No. Stambuk **105730420113** telah diperiksa dan diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan telah dipertahankan di depan penguji pada hari Sabtu 14 Oktober 2017. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

24 Muharram 1439 H

Makassar, -----

14 Oktober 2017 M

Panitia Ujian:

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji
 - a. Drs. H. Sultan Sarda, MM 
 - b. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak CA 
 - c. Hj. Naidah, SE., M.Si 
 - d. Muttiarni, SE., M.Si 

ABSTRAK

Devi Apriliyanti, 2017. “PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DAMPAKNYA PADA KINERJA KEUANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR”. Dibimbing oleh Bapak H. Sanusi A.M (Pembimbing I) dan Ibu Muttiarni (Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan, pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan, secara simultan maupun parsial pada badan pengelolaan keuangan aset daerah kota Makassar.

Dalam penelitian ini metode yang dilakukan adalah metode analisis Deskriptif Kuantitatif, penelitian ini digunakan dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder (APBD), yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Makassar.

Hasil penelitian ini adalah belanja modal berpengaruh pada pendapatan asli daerah (PAD), dan PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dilihat dari koefisien ditunjukkan bahwa hasilnya positif, sedangkan belanja modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, namun belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui PAD.

Kata Kunci : Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, kinerja keuangan, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Modal (APBD).

ABSTRACT

Devi Apriliyanti, 2017. "THE INFLUENCE OF CAPITAL EXPENDITURES TO REAL REGIONAL INCOME AND IMPACT ON FINANCIAL PERFORMANCE OF MAKASSAR CITY". Guided by Mr. H. Sanusi A.M (Supervisor I) and Mrs. Muttiarni (Pembimbing II).

This study aims to find out how the influence of capital expenditure on local revenues (PAD) and the effect of PAD on financial performance, the influence of capital expenditure on financial performance, simultaneously and partially on the financial management of Makassar city asset.

In this research, the method used is Quantitative Descriptive analysis method, this research is used with data collection technique of interview, documentation and observation. The type of data used is primary and secondary data (APBD), sourced from the Realization Report of Regional Revenue and Expenditure Budget at the Regional Asset Management Finance Agency of Makassar.

The result of this research is capital expenditure influential on local revenue (PAD), and PAD influence to financial performance, seen from coefficient indicated that the result is positive, while capital expenditure partially does not have an effect to financial performance, but capital expenditure influence to financial performance through PAD .

Keywords : Capital Expenditure, Local Original Income, Financial Performance, Realization Report of Capital Expenditure and Budget (APBD).

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Dia memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (QS Al Najm : 31)”

“Pengetahuan tidaklah cukup kalau kita tidak mengamalkannya. Niat tidaklah cukup kalau kita tidak melakukannya (Johan Wolfgang von Goethe)”

“Jangan pernah mengeluh pada keadaan sekarang, tetapi bersyukurlah atas semua yang diberikan”

“Lakukan yang terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan orang lain”zS

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Orang tuaku tercinta

Saudara-saudaraku semua

Seluruh sahabat dan teman-teman

Almanaterku

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas Berkah, Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Tak lupa pula penulis kirimkan shalawat dan salam kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW semoga keselamatan senantiasa tercurah kepadanya dan kepada seluruh umatnya.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moril maupun material serta kerjasama dari berbagai pihak, oleh karena itu dari lubuk hati yang paling dalam penulis menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Orang Tuaku, Ayahanda Julkarnain dan Ibunda Nuraini hidayati yang telah memberikan doa, pengorbanan, cinta, dan kasih sayang kepada penulis yang tak ternilai harganya, semoga ketulusan hati mendidikku mendapat balasan pahala dan limpahan rahmat Allah SWT. Serta kakak-kakakku; Iswahyudin, Sri hartati muliati Sp,d, Nurrahmi, Bahtiar, dan adikku Novita yang senantiasa menyemangatiku, memberi bantuan materil dan arahan dalam setiap langkahku.
2. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Rasulong.,SE.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Ismail Badollahi SE.,M.Si.Ak.CA selaku ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang telah banyak memberikan arahan-arahan positif.

5. Bapak Drs. H. Sanusi A.M., SE, M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Muttiarni SE, M.Si selaku Pembimbing II atas segala keikhlasan, kesabaran dan ketulusannya membimbing penelitian dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf fakultas Ekonomi, didikan, dan dorongan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Unismuh.
7. Segenap pimpinan karyawan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kota Makassar yang telah memberikan ijin dan bantuan serta dukungan selama penulis melaksanakan penelitian.
8. Sahabat-sahabatku; Ekha, Aen, Iyhan, Isda, Hasmi dan Risky serta teman-teman yang tidak sempat saya tuliskan satu persatu. Terima kasih atas Herli ratnasari, Risna dan bantuan pemikirannya selama ini kepada penulis. Terutama kepada temanku Omi atmasari yang bersedia membantu dan membimbing penulis menyusun skripsi ini. Tak lupa pula penulis ucapkan kepada Erwinsyah yang selalu memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Juni 2017

Penulis

DEVI APRILYANTI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACK.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Pendapatan.....	9
B. Belanja Modal.....	23
C. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	26
D. Penelitian terdahulu.....	34
E. Kerangka Pikir.....	42

F. Hipotesis.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Penelitian	45
B. Jenis dan Sumber Data	45
C. Teknik Pengumpulan Data.....	46
D. Metode Analisis Data.....	46
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Gambaran Umum (BPKA) Kota Makassar.....	49
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPKA.....	50
C. Sumber Daya BPKA	60
D. Kinerja Pelayanan BPKA.....	62
E. Tantangan dan peluang Pengembangan.....	63
BAB V PEMBAHASAN	
A. Data Pertumbuhan Belanja Modal, PAD dan Kinerja Keuangan.....	65
B. Data Hasil Analisi	69
C. Hasil Pengujian Hipotesis	75
D. Pembahasan.....	77
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	81
C. Keterbatasan penelitian	82
DAFTAR PUSTAKA	
Lampiran	

DAFTAR TABEL

2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	38
4.1 Berdasarkan Golongannya	61
4.2 Berdasarkan Pendidikan.....	61
5.1 Data Pertumbuhan Belanja Modal	65
5.2 Data Pertumbuhan PAD.....	67
5.3 Data Pertumbuhan Kinerja Keuangan.....	68
5.4 Descriptive Statistics	70
5.5 Uji Multikolonieritas	73
5.6 Uji Regresi Persamaan 1	75
5.7 Uji Regresi Persamaan 2	76
5.8 Pengaruh Belanja Modal (X) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Z) Secara Langsung Dan Tidak Langsung	78
5.9 Pengaruh Belanja Modal (X) Terhadap kinerja Keuangan (Y) Melalui Z.....	79

DAFTAR GAMBAR

2.1 Skema Kerangka Pikir.....	44
4.1 Struktur Organisasi	77
5.1 Hasil Dalam Bentuk Diagram	77

DAFTAR GRAFIK

5.1 Data Pertumbuhan Belanja Modal	66
5.2 Data Pertumbuhan PAD	67
5.3 Data Pertumbuhan Kinerja Keuangan.....	69
5.4 Kurva Histogram.....	71
5.5 Normal P-P PLOT.....	72
5.6 Scatterplot	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan Keuangan Daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak diterapkannya otonomi daerah pada Tahun 2001. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No.33 Tahun 2004 yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan Otonomi Daerah pada hakekatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik yang menyangkut sumber daya manusia, dana maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Dengan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap Pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Tingkat kemampuan keuangan daerah salah satunya dapat

diukur dari besarnya penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah. Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis

sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Menurut Halim (2008) analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi cirri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan pertumbuhan (Sularso & Restianto,2011).

Dari penjelasan kinerja dan kinerja keuangan tersebut dapat juga ditarik kesimpulan bahwa Pertumbuhan kinerja keuangan adalah kemampuan suatu perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Untuk mengetahui terjadinya peningkatan apa tidak dapat dilakukan analisis keuangan terlebih dahulu, setelah mengetahui hasilnya maka dapat diketahui juga kinerja perusahaan tersebut apakah baik atau buruk.

Dalam penelitian ini laporan keuangan yang digunakan adalah laporan realisasi APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2016. Komponen-komponen yang terdapat dalam laporan tersebut dapat dijadikan sebagai variabel untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Laporan realisasi APBD terdiri dari pendapatan dan belanja daerah . Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama

sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas untuk investasi. Konsekuensinya, pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini.

Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan asset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Dengan berkembang pesatnya pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan. Untuk dapat mengetahui terjadinya peningkatan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah bisa dijadikan sebagai tolak ukurnya karena PAD ini sendiri merupakan komponen yang penting yang mencerminkan bagaimana sebuah daerah (dalam penelitian ini terdiri dari kabupaten/kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan) dapat mendanai sendiri kegiatannya melalui komponen pendapatan yang murni dihasilkan melalui daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dengan ditambahkan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan

meningkatnya pendapatan asli daerah. Semakin besar dana Pendapatan Asli Daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembangunan di daerahnya masing-masing.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesuksesan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Dan variabel pendapatan asli daerah serta belanja modal dapat dijadikan sebagai variabel yang dapat mempengaruhi pertumbuhan kinerja keuangan daerah. Adi (2006) dalam penelitiannya pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD, dan Belanja pembangunan memberikan dampak positif terhadap PAD dan pertumbuhan ekonomi.. Florida (2007) mengatakan bahwa secara parsial hanya pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD saja yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara secara simultan PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan Kota di provinsi Sulawesi Selatan. ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah.

Kebutuhan masyarakat yang meningkat mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan peningkatan penerimaan daerah dengan memberi perhatian kepada perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber PAD adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi

daerah, hasil laba usaha daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Jalan keluar dari permasalahan tersebut adalah Pemerintah Daerah mampu untuk mengidentifikasi perkembangan kinerjanya dari tahun ke tahun. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisa rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2004: 148)

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Makassar provinsi Sulawesi Selatan, penelitian memutuskan hal tersebut dikarenakan peneliti ingin mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Makassar provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan mulai dari tahun 2012-2016. Penelitian ini sangat penting karena dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh penerimaan dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah di Kabupaten/Kota Makassar provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "*Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Makassar Sulawesi Selatan.*"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kota Makassar ?
2. Bagaimana pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kota Makassar.
3. Bagaimana pengaruh Belanja modal terhadap kinerja keuangan melalui PAD pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kota Makassar

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh belanja modal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Aset Keuangan Daerah Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kota Makassar.

3. Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh Belanja modal terhadap kinerja keuangan melalui PAD pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kota Makassar

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia akademik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Menambah wawasan penulis khususnya dalam bidang akuntansi keuangan daerah.

- b. Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang ada, termasuk para pendidik di dalamnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Berdasarkan kenyataan yang ada pemakaian kata pendapatan (*revenue*) dengan pendapatan (*income*) sering dipakai secara bergantian pada hal kedua pengertian ini mempunyai pengertian di atas terlebih dahulu dikutip pengertian pendapatan menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 23 tahun 2004 mengemukakan bahwa peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban suatu badan usaha yang timbul dari penyerahan barang degang/jasa atau aktivitas usaha lainnya di dalam suatu periode, yang tidak termasuk dalam pengertian pendapatan adalah peningkatan aktiva perusahaan yang timbul dari pembelian harta, investasi oleh pemilik, pinjaman ataupun koreksi laba rugi periode lain.

(PSAK 24 Imbalan Kerja 1 januari 2017). Pasar obligasi korporasi tinggi nilai berdasarkan denominasi mata uang obligasi dan bukan berdasarkan Negara Obligasi tersebut berada

(PSAK 58 Aset dimiliki untuk dijual 1 januari 2017).
Perubahan metode pelepasan dari rencana awal bukan pelepasan baru.

Adapun pendapatan pendapatan menurut Sofyan Syafri Harapan (2007 : 76), definisi pendaapatan adalah sebagai berikut :

pendapat berasal dari penjualan barang dan pemberian jasa dan diukur dengan jumlah yang dibebankan kepada langganan, klaim atas barang dan jasa yang disiapkan untuk mereka juga termasuk laba dari penjualan ataupun pertukaran aset (kecuali surat berharga), hak deviden dari investasi dan kenaikan lainnya pada modal pemilik kecuali yang berasal dari modal dan penyesuaian modal.

Secara khusus, IAI (2009) mengatur kriteria pengakuan pendapatan kedalam kelompok penjualan, yakni kriteria penjualan barang dan penjualan jasa. Menurut IAI dalam PSAK No. 23 paragraf 19, menyatakan bahwa *"bila hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca."* Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal bila memenuhi kondisi sebagai berikut:

- a. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal.
- b. besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan.
- c. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal.
- d. Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut untuk dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Dari beberapa definisi mengenai pendapatan yang telah disebutkan maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan manfaat ekonomi yang diterima setelah adanya penjualan barang atau pemberian jasa dengan adanya timbal balik pengorbanan ekonomi yang telah dikeluarkan.

2. Jenis-jenis pendapatan

Menurut Kusnadi (2009 : 19) menjelaskan bahwa pendapatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Pendapatan operasi

Pendapatan operasi dapat diperoleh dari dua sumber yaitu

1) Penjualan kotor

Penjualan kotor adalah penjualan sebagaimana tercantum dalam faktur atau jumlah awal pembebanan sebelum dikurangi penjualan return dan potongan penjualan.

2) Penjualan bersih

Penjualan bersih adalah penjualan yang diperoleh dari penjualan kotor dikurangi return ditambah dengan potongan penjualan lain-lain.

b. Pendapatan non operasi

Pendapatan non operasi dapat diperoleh dari dua sumber yaitu:

1) Pendapatan bunga

Pendapatan bunga adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan karena telah meminjam uangnya kepada pihak lain

2) Pendapatan sewa

pendapatan sewa adalah pendapatan yang diterima perusahaan karena telah meminjam aktivasnya untuk perusahaan lain.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa jenis jenis pendapatan terdiri dari pendapatan operasi yang diperoleh dari penjualan kotor dan penjualan bersih, pendapatan non operasi diperoleh dari pendapatan bunga dan pendapatan sewa.

3. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut (Abdul Halim, 2002) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sedangkan (Mardiasmo, 2002). Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari tahun ke tahun kebijakan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap daerah provinsi, kabupaten dan kota relative tidak banyak berubah. Artinya, sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) kompenennya itu-itu juga yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, dan bagian laba dari BUMN. Hal ini lebih dipengaruhi oleh kebijakan *Fiscal (National Fiscal Policy)* pemerintah pusat mengandalkan penerimaan jenis pajak yang “subur” untuk kepentingan nasional.

Selain Desentralisasi digulirkan oleh pemerintah pusat, maka Pemerintah Daerah (pemda) berlomba-lomba menciptakan “kreativitas baru” untuk mengembangkan dan meningkatkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing daerah. Akan tetapi pertanyaannya adalah apakah dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah (pemda) mampu melaksanakan seluruh kewenangannya. Apakah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan Desentralisasi atau Otonomi Daerah?

Selama Pendapatan Asli Daerah (PAD) benar-benar tidak memberatkan atau membebani masyarakat lokal, Investor lokal, maupun Investor asing, tentu tidak masalah. Dan dapat dikatakan bahwa daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkatkan setiap tahun mengindikasikan daerah tersebut mampu membangun secara mandiri tanpa tergantung dana pusat.

Sebaliknya jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru berdampak terhadap perekonomian daerah yang tidak berkembang atau semakin buruk, maka belum dapat dilakukan keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah pemahaman kemana sebenarnya pergerakan Otonomi Daerah masih kurang. Mereka berfikir Otonomi Daerah hanya untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar-besarnya. Itu persepsi yang salah.

Tujuan dan sasaran pemberian Otonomi Daerah dalam artian wewenang yang luas kepada Kabupaten dan kota adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mempertimbangkan bahwa ini sangat memberatkan masyarakat lokal, investor lokal dan investor asing, justru menghambat perkembangan perekonomian daerah terutama dalam era kompetitif yang berlaku sekarang. Dimana pelayanan terbaik dan iklim usaha yang kondusif ikut menentukan investasi di daerah.

Menurut Nurcholis (2007:182), Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

Selama Pendapatan Asli Daerah (PAD) benar-benar tidak memberatkan atau membebani masyarakat lokal, investor lokal, maupun investor asing, tentu tidak masalah. Dan dapat dikatakan bahwa daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkatkan setiap tahun mengindikasikan daerah tersebut mampu membangun secara mandiri tanpa tergantung dana pusat.

4. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan.

Peningkatan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah pusat dan daerah. bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari.

a. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Pada Tanggal 18 Agustus 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Republic Indonesia telah menyetujui dan mengesahkan rancangan Undang-Undang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Pengesahan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) ini sangat strategis dan mendasar dibanding desentralisasi fisikal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan

antara Pusat dan Daerah. Undang-Undang yang baru ini mulai tanggal 1 Januari 2010.

UU DPRD ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintah dan sekaligus memperkuat otonomi daerah.
- 3) Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Ada beberapa prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang di gunakan dalam penyusunan UU ini yaitu:

- 1) Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak terlalu membenani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional
- 2) Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

- 3) Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak dalam batas tarif minimum dan maximum ditetapkan dalam Undang-Undang.
- 4) Pemerintah daerah tidak dapat memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam Undang-Undang sesuai kebijakan pemerintah daerah .
- 5) Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara preventif dan korektif. Rancangan peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi harus dapat persetujuan pemerintah sebelum ditetapkan menjadi perda. Pelanggaran aturan tersebut dapat dikenakan sanksi.

b. Penambahan Pajak Daerah

Pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai mana dibawah ini:

Jenis pajak propinsi terdiri atas:

- 1) Pajak kendaraan bermotor
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- 4) Pajak air permukaan
- 5) Pajak rokok

Jenis pajak kabupaten dan kota terdiri atas:

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restoran

- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak oenerangan jalan
- 6) Pajak mineral bukan logam dan bebatuan
- 7) Pajak parker
- 8) Pajak air tanah
- 9) Pajak sarang burung walet
- 10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- 11) Bea perolehan atas tanah dan bangunan

Ada empat jenis pajak baru bagi daerah, yaitu pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan atas tanah dan bangunan yang sebenarnya merupakan pajak pusat. Dan pajak sarang burung walet yang ditetapkan sebagai pajak kabupaten dan kota. Dengan tambahan tersebut secara keseluruhan ada 16 jenis pajak daerah, yaitu 5 jenis pajak propinsi dan 11 jenis pajak kabupaten dan kota.

1) Pajak Rokok

Pajak rokok dikenakan atas cukai yang ditetapkan oleh pemerintah. Hasil penerimaan pajak rokok tersebut 70% di bagi hasilkan kepada kabupaten dan kota propinsi yang bersangkutan. Selain itu, penerimaan pajak rokok dialokasikan minimal 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan (pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai perokok), kegiatan masyarakat mengenai bahaya merokok dan iklan layanan, masyarakat mengenai bahaya rokok.

2) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran

Selama ini PBB merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaanya diserahkan kepada daerah, untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah, khusus PBB sektor perdesaan dan perkotaan di alihkan menjadi pajak daerah. Maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3) Bea perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB)

Selama ini BPHTB merupakan pajak pusat, namun seluruh hasilnya di serahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dari BPHTB sebagai pajak daerah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4) Pajak sarang burung walet

Pajak sarang burung walet merupakan jenis pajak daerah baru, yang dapat dipungut oleh daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis dari keberadaan dan perkembangan sarang burung walet di wilayahnya. Bagi daerah yang memiliki potensi sarang burung walet yang besar akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya (PAD).

c. Retribusi Daerah

Disamping pajak daerah sebagaimana disebutkan sebelumnya, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga meliputi retribusi atau perizinan yang diperoleh dalam Undang-Undang. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

Yang dimaksud retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk kepentingan orang atau badan.

Perbedaan antara pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak hanya didasarkan atas objeknya, tetapi juga perbedaan atas objeknya, tetapi juga perbedaan atas pendekatan tarif. Oleh karena itu, tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik didaerahnya.

Retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1) Retribusi jasa umum

Yaitu pelayanan yang disediakan atau yang diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.

2) Retribusi jasa usaha

Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi.

3) Retribusi perizinan tertentu

Adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, Penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini menurut objek pendapatan yang mencakup:

1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik/BUMD

2) Bagian laba atas Penyertaan modal perusahaan milik Negara/BUMN

3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

e. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari Lain-lain milik pemerintah daerah (pemda). Rekening ini disediakan untuk mengakuntansi penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Pendapatan asli daerah lainnya yang disahkan seperti penjualan aset tetap daerah, pendapatan denda pajak dan jasa giro.

5. Strategi Peningkatan PAD

Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Kabupaten / Provinsi undang-undang yang berlaku telah bergeser yaitu dengan berlakunya undang-undang nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan berlakunya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan untuk menjelaskan posisi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Untuk menganalisa Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten menunjukkan Keuangan Daerah yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut, dengan sistem Desentralisasi yang dikembangkan menggunakan Analisis *SWOT*.

B. Belanja Modal

1. Pengertian Belanja Modal

Menurut PSAP Nomor 02, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender (PP No. 71, 2010).

Sedangkan menurut Halim (2004:73), Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang member manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, termasuk didalamnya, pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Aset tetap mempunyai cirri-ciri berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dan nilainya relatif material. Sedangkan cirri-ciri aset lainnya adalah tidak berwujud, akan

menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun, dan nilainya relatif material.

Belanja modal meliputi antara lain:

- a. Belanja modal tanah, adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, baik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- b. Belanja modal peralatan dan mesin, adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan Dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan mesin tersebut siap digunakan.
- c. Belanja modal gedung dan bangunan, adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggatian gedung dan bangunan sampai dengan bangunan dan gedung yang dimaksud dalam kondisi siap digunakan.
- d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggatian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan yang

menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap digunakan.

- e. Belanja modal fisik lainnya, adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat digunakan kedalam belanja modal diatas termaksud dalam belanja ini adalah belanja yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap digunakan.

Suatu belanja di katagorikan sebagai belanja modal apabila:

- 1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas.
- 2) Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- 3) Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk di jual atau dibagikan.

2. Peran Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat lebih dari stu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi

antara lain Belanja Modal untuk peroleh tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.(PP No. 24 Tahun 2005).

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah Daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja Modal dalam APBD. Alokasi Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan Daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara financial.

Secara teoritis ada 3 cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya dan membeli. Namun biasanya, cara yang dilakukan dalam pemerintahan adalah dengan cara membeli, proses pembelian yang dilakukan umumnya melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit

C. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

1. Pengertian Kinerja

Adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, visi dan misi organisasi terutang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Mardiasmo (2002) mendefinisikan sistem pengukuran kinerja publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur financial dan non financial. Adapun indikator kinerja seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002) bahwa sekurang-kurangnya ada empat tolak ukur penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu:

- a. Penyimpangan antara realisasi anggaran daerah yang ditargetkan yang ditetapkan dalam APBD.
- b. Efisiensi biaya
- c. Efektivitas program
- d. Pemerataan

2. Pengertian Keuangan Daerah

Menurut (Halim 2008) menyatakan keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Di lain pihak, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan

keajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh Negara. Keuangan daerah berperan penting dalam otonomi daerah karena dari keuangan daerah menggambarkan cerminan kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi.

Salah satu aspek pemerintah daerah yang harus diatur adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam upaya pemberdayaan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik, hal ini tidak saja terlihat dari besarnya porsi penganggaran untuk kepentingan public, tetapi pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah.

Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai isi pasal 4 yaitu:

- a. Keuangan daerah dikelola secara terbit, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

- b. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Untuk bisa menjalankan tugas dan fungsi pemerintah, pemerintah daerah dilengkapi dengan seperangkat kemampuan pembiayaan dimana menurut pasal 55 sumber pembiayaan pemerintah terdiri dari 3 komponen yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari beberapa pos pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan pendapatan yang sah lainnya.
 - 2) Pendapatan yang berasal pusat yang terdiri dari pendapatan hasil pajak bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
 - 3) Pendapatan Daerah yang Sah Lainnya.
3. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi mampu organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat baru. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan.

Salah satu alat menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2008: 230). Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya pada APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meski demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta (Halim, 2008: 231-232).

Menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 108/2000 pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah:

a. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

DPRD adalah badan yang memberikan otoritas pada pemerintah daerah untuk mengelola lapangan keuangan daerah.

b. Badan eksekutif

Merupakan badan penyelenggara pemerintah yang menerima otorisasi pengelolaan keuangan daerah dari DPRD, seperti Gubernur, Bupati, Walikota, serta pimpinan unit Pemerintah Daerah lainnya.

c. Badan pengawasan keuangan

Adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Yang termasuk dalam badan ini adalah Inspektorat Jendral, Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan badan Pemeriksa Keuangan.

d. Investor, kreditor dan donator

Badan atau organisasi baik pemerintah, lembaga keuangan, maupun lainnya baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi pemerintah daerah.

e. Analisis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah

Analisis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah yaitu pihak-pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan pemerintah pemerintah daerah, seperti lembaga pemerintah, ilmuwan, peneliti dan lain-lain.

f. Rakyat

Rakyat disini adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintah khususnya yang menerima pelayanan pemerintah daerah atau yang menerima produk atau jasa dari pemerintah daerah.

g. Pemerintah pusat

Pemerintah pusat memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai pertanggungjawaban Gubernur sebagai wakil pemerintah.

4. Rasio-Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

a. Rasio kemandirian keuangan daerah

Menurut Widodo (Halim, 2008: 234) kemandirian keuangan daerah atau ekonomi fiskal menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan penerimaan daerah. Tingkat kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat membayar pihak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama dalam pendapatan asli daerah (Rondal dan Sarmiyatiningsih, 2009: 34)

Menurut Halim (2008: 234) Rasio kemandirian diukur dengan:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Efektivitas terhadap PAD

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 100 atau lebih dari 100%. Dengan demikian semakin

besar rasio efektivitas maka kinerja pemerintahanpun semakin baik
(Halim, 2008: 234)

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pemerintahan PAD}}{\text{Target Pemerintahan PAD yang ditetapkan}}$$

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Analisis tingkat efisiensi keuangan daerah dapat dihitung dengan menggunakan rasio efisiensi, yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara *output* dan *input* atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Menurut Halim (2007: 234) rasio efisiensi keuangan daerah dapat diukur dengan:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

d. Rasio Rasio Keserasian Belanja Daerah

Penelitian Rasio ini menggambarkan bagaimana pemda memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin/belanja operasi dan belanja pembangunan/belanja modal secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin/belanja operasi berarti presentase belanja modal/pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana

dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. rasio keserasian dapat diukur sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

e. Rasio pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari period eke periode berikutnya. Menurut Halim (2008: 235) rasio pertumbuhan dapat diukur dengan :

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Keterangan :

r = pertumbuhan (dalam persen)

P_n = realisasi pendapatan dan belanja pada tahun ke-n

P_o = realisasi pendapatan dan belanja pada tahun awal atau tahun sebelumnya.

D. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang meneliti tentang analisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di propinsi sumatera selatan. Dengan menggunakan metode analisis kuantitatif dengan model regresi berganda.

Hasil penelitian Cherrya (2012) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara silmultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun, secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah daerah.

Selanjutnya hasil penelitian dari Sugiyanta (2016) menyatakan bahwa SILPA berkolerasi secara signifikan pada arah positif. Hal ini mempunyai makna bahwa peningkatan SILPA berasosiasi dengan peningkatan alokasi belanja modal. Menggunakan metode enam variabel independen.

Fajar Nugroho (2012) melakukan penelitian tentang Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening, dengan menggunakan metode dokumentasi. Data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah secara langsung, sedangkan secara tidak langsung Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan melalui Pendapatan Asli daerah sebagai variabel intervening.

Hustianto Sudarwadi (2015) melakukan penelitian tentang “pengaruh pendapatan asli daerah, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal daerah (studi empiris pada kabupaten/kota. Metode yang

digunakan adalah variabel independen dan variabel dependen. Hasil penelitian adalah semakin besar pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan suatu daerah maka pengeluaran pemerintah daerah terhadap belanja modal akan semakin besar pula sehingga aset yang dimiliki pemerintah daerah tersebut akan bertambah pula.

Anggita Ariza (2014) melakukan penelitian tentang “pengaruh pertumbuhan ekonomi dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia (Ipm) dalam perspektif islam. Dengan menggunakan metode Efek tetap. Dan adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap, IPM.

Tejo Nurseto (2012) melakukan penelitian tentang Evaluasi kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah sektor pendidikan propinsi DIY. Dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran pendidikan mempunyai nilai dan pengaruh yang lebih kecil dari pada pendapatan perkapita.

Rvanda Saputra (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah dan dampaknya bagi kinerja keuangan pemerintah. dengan menggunakan metode secara dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan, belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan secara langsung, sedangkan secara tidak

langsung belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah.

Ida Ayu Candra (2016) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. observasi non partisipan. Hasil penelitian ini memiliki hasil yang serupa dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Mirza (2012) dengan hasil yang diperoleh, yaitu belanja modal mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan pada IPM.

Mahyu Danil (2013). melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Bupati. menggunakan metode regresi sederhana. Hasil penelitian, menunjukkan pendapatan PNS dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumsi, seperti biaya pendidikan anak, biaya kesehatan, biaya transportasi dan biayalain-lain. 82,8 % pendapatan diakomodasikan dalam konsumsi. Perubahan pendapatan memiliki pengaruh sebesar 1,21% pada tingkah laku konsumsi.

Andri (2016) melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh pendapatan asli daerah , dana Alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap Belanja modal (studi pada kota bitung). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ordinary Least Square (OLS). hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan memiliki pengaruh

positif terhadap Variabel Dependen Belanja Modal. Namun secara parsial Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis / Tahun	Judul Penelitian	Metode dan Variabel	Hasil penelitian
1.	Cherrya, (2012)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan	Metode Penelitian menggunakan Analisis kuantitatif, dengan model regresi berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun, secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah daerah.
2.	Sugiyanta, (2016)	Analisis Belanja Modal Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kabupaten/Kota	metode penelitian ini menggunakan enam variabel independen yaitu Kemandirian Daerah (mandiri), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), dan Belanja Pegawai.	hasil penelitian mendapat hasil bahwa SILPA berkolerasi secara signifikan pada arah positif. Hal ini mempunyai makna bahwa peningkatan SILPA berasosiasi dengan peningkatan alokasi Belanja Modal.

3.	Fajar Nugroho (2012)	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening	metode dokumentasi. Data yang digunakan adalah data sekunder.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah ,dan pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan berpengaruh positif, sedangkan secara parsial belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan tapi berpengaruh melalui PAD.
4.	Hustianto Sudarwadi (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota.	Metode yang digunakan adalah variabel independen dan variabel dependen	Hasil dari penelitian ini adalah pertama, semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan suatu daerah maka pengeluaran pemerintah daerah terhadap belanja modal akan semakin besar pula sehingga aset yang dimiliki Pemerintah Daerah tersebut akan bertambah pula. kedua, sama halnya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepala pemerintah daerah bisa mempengaruhi pengeluaran pemerintah daerah tersebut untuk membelanjakan aset sehingga kekayaan daerahpun meningkat. Ketiga, besarnya Belanja Modal tidak mempengaruhi oleh besarnya Dana alokasi khusus yang ditransfer oleh Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah. dengan kata lain, meningkatkan Dana Alokasi

				Khusus (DAK) suatu daerah tidak diikuti oleh meningkatkan aset suatu daerah, demikian pula sebaliknya.
5.	Florida (2006).	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dalam Perspektif Islam	Metode yang digunakan adalah Efek tetap.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap, IPM.
6.	Tejo Nurseto, (2012)	Evaluasi Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sektor Pendidikan Provinsi DIY	Metode yang digunakan adalah metode Deskriptif.	Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa anggaran pendidikan mempunyai nilai dan pengaruh yang lebih kecil daripada pendapatan perkapita. Oleh karena itu, disamping meningkatkan alokasi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DIY pemerintah Provinsi DIY seharusnya dapat meningkatkan pertumbuhannya sehingga dapat meningkatkan PDRB.
7.	Rvanda Saputra, (2014)	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah.	Metode yang dilakukan adalah secara Dokumentasi	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan, Belanja Modal

				tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan secara langsung, sedangkan secara tidak langsung Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan, Laporan Realisasi, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
8.	Ida Ayu Candra, Ni Luh Supadmi (2016).	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia	Metode yang dilakukan adalah observasi non partisipan.	Hasil penelitian ini memiliki hasil yang serupa dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Mirza (2012) dengan hasil yang diperoleh, yaitu belanja modal mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan pada IPM.
9.	Mahyu Danil, (2013).	Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Bupati	Metode yang digunakan adalah regresi sederhana	Hasil penelitian, menunjukkan pendapatan PNS dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumsi, seperti biaya pendidikan anak, biaya kesehatan, biaya transportasi dan biyalain-lain. 82,8 % pendapatan diakomodasikan dalam konsumsi. Perubahan pendapatan memiliki pengaruh sebesar 1,21% pada tingkah laku konsumsi
10.	Andri, Een N. Walewangko, (2016)	Analisis Pengaruh pendapatan asli daerah, dana Alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap Belanja modal (studi pada kota bitung)	Metode yang akan digunakan Ordinary Least Square (OLS)	hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap Variabel Dependen Belanja Modal. Namun secara parsial Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah.

E. Kerangka Pikir

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut KSAP (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) dalam PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) Nomor 02, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial (Ardhani, 2011).

Belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah secara langsung, sedangkan secara tidak langsung belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening (Nugroho, 2012). Upaya dalam menggenjot belanja modal merupakan perkara yang sangat penting bagi pemerintah daerah karena dapat meningkatkan produktivitas perekonomian sehingga dapat mengurangi ketergantungan

terhadap pemerintah pusat dan semakin besar alokasi belanja modal pada tahun selanjutnya. Hal ini akan memberi dampak yang baik terhadap pertumbuhan kinerja keuangan dari tahun ketahun secara terus-menerus.

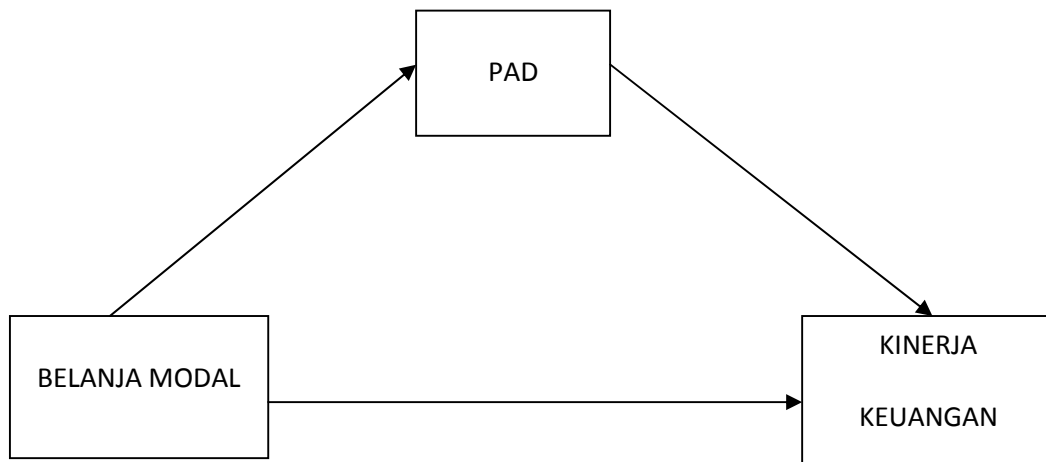
Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli daerah

Suatu daerah untuk menambah aset tetap daerahnya yang dapat berupa pembangunan infrastruktur sebagai sarana untuk pelayanan publik, Maka pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam anggaran pendapatan belanja daerahnya, Sehingga pemerintah daerah dapat melakukan pemungutan yang bersifat retribusi dan pajak atas infrastruktur yang telah dibangun untuk pelayan publik tersebut sebagai upaya dalam meningkatkan PAD.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Melalui PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebagai Variabel Intervening.

PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:94). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka skema kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar : Kerangka Pikir Penelitian

F. Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mencoba untuk merumuskan hipotesis yang akan diuji kebenarannya, apakah hasil penelitian akan menerima atau menolak hipotesis tersebut. Adapun hipotesis dari penelitian ini antara lain: Diduga bahwa

1. Belanja modal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kota Makassar.
2. PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kota Makassar.
3. Belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui PAD pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kota Makassar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat Dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi/tempat penelitian dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kota Makassar yang terletak di Jl. Jend. Ahmad Yani No.2, Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90171.

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu dua bulan.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis data

Yaitu data kuantitatif, data yang berbentuk angka-angka, seperti laporan keuangan, harga saham, dan besarnya pendapatan.

2. Sumber data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung yang memerlukan pengolahan lebih lanjut dan dikembangkan dengan pemahaman sendiri oleh penulis.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang sudah diolah yang bersumber dari kantor pemerintah yang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

1. Tekni wawancara, yaitu melakukan Tanya jawab langsung secara lisan dengan beberapa pihak yang berkompeten dan berwenang dalam memberikan data yang dibutuhkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sehubungan dengan kebijakan pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kota Makassar.
2. Observasi, bentuk metode ini merupakan pengamatan secara langsung pada keadaan yang sebenarnya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar.
3. Teknik dokumentasi, yaitu melakukan penghimpunan atas data sekunder untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini, seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan

D. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu dengan mengumpulkan, mengolah dengan perhitungan dengan menggunakan :

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, dan sebagainya (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah pertumbuhan kinerja keuangan daerah, pendapatan asli daerah, dan belanja modal.

2. Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas terhadap data.

3. Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan analisis regresi dengan variabel intervening. Untuk menguji pengaruh variabel intervening digunakan metode analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi untuk mengestimasi hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Berdasarkan analisis jalur dapat diketahui besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel. Pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel dapat dilihat sebagai berikut:

Pengaruh langsung BM → KK

Pengaruh tidak langsung BM → PAD → KK

Persamaan matematis untuk hubungan yang dihipotesiskan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PAD} = b_1 \text{BM} + e \dots\dots\dots (\text{H1})$$

$$\text{KK} = b_1 \text{BM}_{t-1} + b_2 \text{PAD}_t + e \dots\dots\dots (\text{H2})$$

Keterangan dari Masing-masing lambang yang digunakan adalah:

BM = Belanja Modal

PAD = Pendapatan Asli Daerah

KK = Kinerja Keuangan

b₁, b₂ = Koefisien

e = *Error*

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Makassar

Kota Makassar kadang dieja *Macassar*, *Mangkasar*; dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai ujung pandang, adalah kota terbesar dikawasan Indonesia Timur dan sekaligus ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota ini terletak di pesisir barat daya pulau Sulawesi, berhadapan dengan Selat Makassar.

Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km² daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km².

Berdasarkan peaturan daerah nomor 7 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2009 tentang pembentukan dan

susunan organisasi perangkat daerah kota Makassar. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) kota Makassar merupakan salah satu unsur staf yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota.

Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) :

“Mewujudkan APBD yang berkualitas menuju opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 2019”.

Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) :

1. Menciptakan kesesuaian APBD dengan dokumen perencanaan dan tepat waktu.
2. Meningkatkan Akurasi Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
3. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah menuju opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
4. Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah yang profesional dan modern.
5. Meningkatkan sarana, prasarana dan SDM dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPKA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah kota Makassar dan Peraturan Walikota Makassar No 12 Tahun 2014 tentang

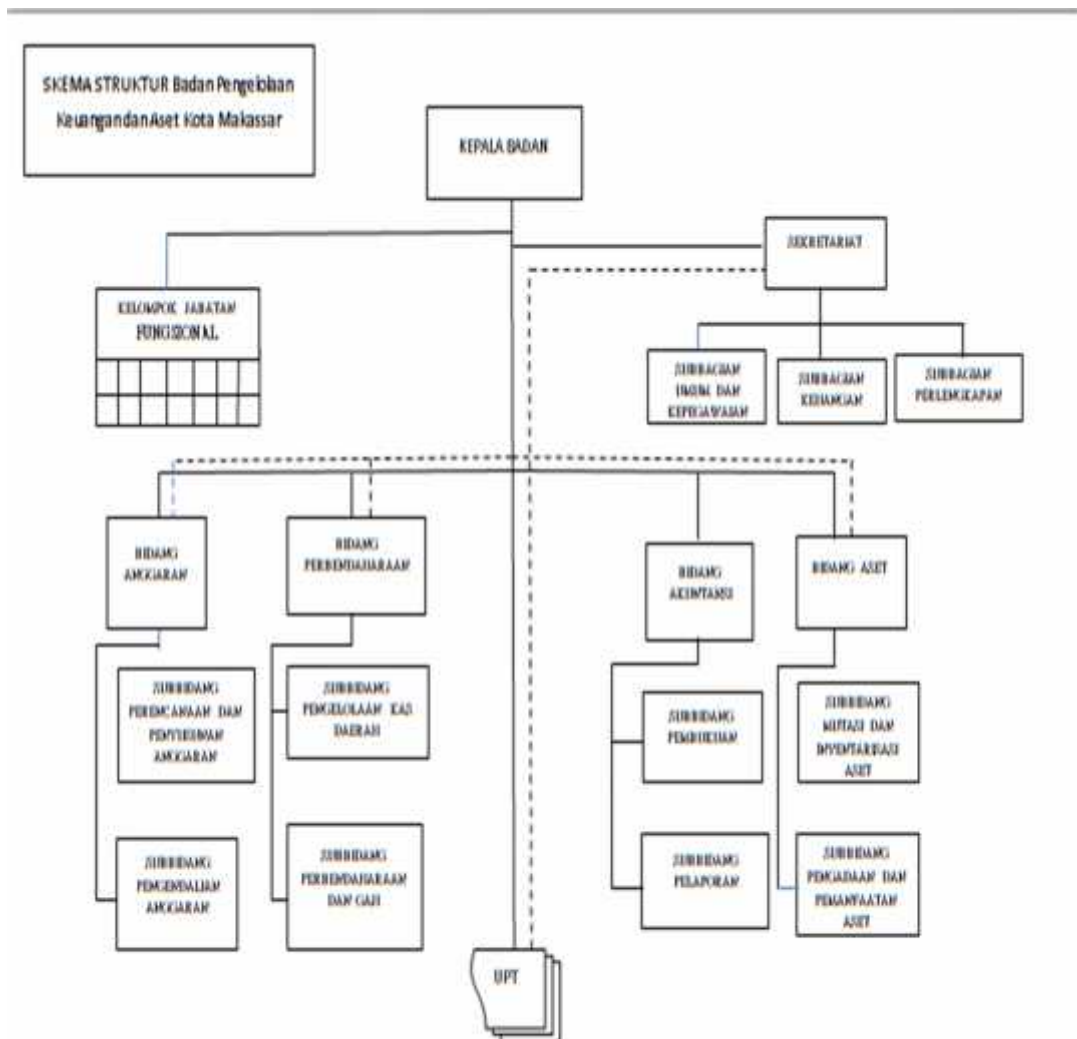
Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Organisasi Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar terdiri dari: 1 (Satu) Kepala Badan, 1 (satu) sekretaris, 4 (empat) kepala bidang, 3 (tiga) kepala sub bagian, dan 8 (delapan) kepala sub bidang. Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar, disajikan pada Bagan 1 sebagai berikut:

Bagan 4.1

Struktur Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar



Badan Pengelolaan Keuangan dan aset dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan Mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Keuangan Daerah, berdasarkan pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, dan
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2).

9. Peraturan Walikota Makassar No 12 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Secara lengkap, struktur organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Sekretaris

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan
- c. Kepala Sub Bagian Perlengkapan

3. Kepala Bidang Anggaran

- a. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
- b. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran

4. Kepala Bidang Perbendaharaan

- a. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
- b. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Gaji

5. Kepala Bidang Akuntansi

- a. Kepala Sub Bidang Pembukuan
- b. Kepala Sub Bidang Pelaporan

6. Kepala Bidang dan Aset

- a. Kepala Sub Bidang Mutasi dan Inventarisasi Aset
- b. Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Aset.

Adapun tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar yang dipimpin oleh Kepala Badan dan dibantu jajaran struktural, sebagai berikut :

a. Sekretaris

Secara umum tugas pokok Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengelolaan ketatausahaan Badan
- 2) pelaksanaan urusan kepegawaian Badan
- 3) pelaksanaan urusan keuangan Badan
- 4) pelaksanaan urusan perlengkapan Badan
- 5) Pelaksanaan urusan umum dan rumahtangga Badan
- 6) pelaksanaan koordinasi perumusan program kerja dan rapat kerja Badan.

b. Kepala Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam urusan penyusunan anggaran, administrasi anggaran dan pembiayaan dan investasi yang menjadi kewenangan pemerintah kota. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Anggaran menyelenggarakan Fungsi :

- 1) penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Anggaran

- 2) penyusunan rencana dan program kerja Bidang Anggaran
- 3) pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 4) pelaksanaan kebijakan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah.
- 5) penyusunan KUA dan PPAS beserta perubahannya.
- 6) pengkoordinasian penyusunan standar harga dan analisis standar belanja daerah.
- 7) melaksanakan pengesahan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD.
- 8) penyusunan perencanaan anggaran kas dan menetapkan SPD.
- 9) pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan daerah dan kebijakan pengelolaan anggaran.
- 10) pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah dan pelaksanaan pembiayaan dan investasi daerah.
- 11) pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan pembiayaan dan investasi.
- 12) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 13) pengelolaan administrasi urusan tertentu.

c. Kepala Bidang Perbendaharaan

Kepala bidang perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam

pengelolaan perbendaharaan umum daerah, perbendaharaan belanjadan verifikasi bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Perbendaharaan.
- 2) perumusan bahan/ data dan informasi untuk menyusun program pembangunan di bidang perbendaharaan.
- 3) pelaksanaan penerbitan SP2D.
- 4) pelaksanaan pemantauan penerimandan pengeluaran APBD oleh Bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk.
- 5) pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.
- 6) pelaksanaan penyimpangan uang daerah dan penempatan uang daerah.
- 7) pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
- 8) pengkoordinasian pelaksanaan kewajiban perpajakan.
- 9) penyusunan kebijakan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan umum daerah, belanja dan verifikasi kelengkapan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah.
- 10) pelaksanaan penyusunan peraturan pelaksanaan dan pengendalian anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- 11) pelaksanaan verifikasi dan meneliti kelengkapan administrasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 12) pengelolaan administrasi urusan tertentu.

d. Kepala Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi memiliki tugas pokok menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang piutang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya dalam rangka menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Akuntansi.
- 2) penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional penyelenggaraan akuntansi daerah.
- 3) penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.
- 4) pelaksanaan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
- 5) pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
- 6) melaksanakan pengelolaan hutang dan piutang daerah.

- 7) penyelenggaraan evaluasi laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 8) pengelolaan administrasi urusan tertentu.

e. Kepala Bidang Aset

Kepala bidang aset memiliki tugas pokok yaitu mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi mutasi aset dan inventarisasi serta pemanfaatan dan pemberdayaan aset.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Aset menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Aset.
- 2) penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang.
- 3) perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya.
- 4) perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi mutasi aset dan inventarisasi serta pemanfaatan dan pemberdayaan asset.
- 5) pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan bahan kebijakan umum dan teknis rencana kebutuhan asset daerah, penelitian dan pengkajian kebutuhan barang daerah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan

barang, mengikuti pelaksanaan pelelangan barang dan bangunan, pelaksanaan administrasi barang daerah, penilaian dan penyusutan asset daerah, pencatatan barang milik daerah, inventarisasi data asset daerah, penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah serta pelaksanaan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali.

- 6) pelaksanaan penyusunan pedoman petunjuk teknis pemanfaatan dan pengendalian kekayaan daerah, evaluasi daftar hasil pengadaan barang daerah, pemantauan dan pengawasan kepemilikan asset daerah serta dokumentasi kepemilikan asset berupa kendaraan, tanah, dan bangunan.
- 7) pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait.
- 8) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya
- 9) pengelolaan administrasi urusan tertentu.

C. Sumber Daya BPKA

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset. Data pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar berjumlah orang posisi tanggal 7 April 2014 dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 4.1
Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Total Orang
1	Golongan I	1	-	1
2	Golongan II	4	6	10
3	Golongan III	13	13	26
4	Golongan IV	3	1	4
Total		21	20	41

Tabel 4.2
Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Total Orang
1	SD. SLTP	-	-	-
2	SLTA	2	2	4
3	Sarjana Muda/ D III	1	-	1
4	Sarjana (S1)	11	12	23
5	Master (S2)	7	6	13
6	Doktor (S3)	-	-	-
Total		21	20	41

Sumber : Sub Bagian Umum & Kepagawaian BPKA

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai instansi pemerintah kota Makassar menempati gedung kantor di Balaikota. Gedung kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset terletak di jalan Jenderal Ahmad Yani 2 Makassar yang ditempati oleh Kepala Badan selaku Bendahara

Umum Daerah, Sekretaris, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi, Bidang Aset.

D. Kinerja Pelayanan BPKA

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja pengelolaan keuangan dan aset kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar masih terbilang SKPD yang baru itu kinerja pelayanan yang akan kami capai yang terdiri :

1. Penyusunan APBD yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Akurasi penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
3. Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang sistematis, akuntabel dan terstruktur.
4. Pengelolaan barang milik daerah yang profesional dan modern.
5. Meningkatkan kapasitas organisasi pengelolaan keuangan dalam hal ini SDM, sarana dan prasarana aparatur BPKA.

E. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKA

Yang menjadi tantangan pelayanan Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Kota Makassar adalah:

1. Sinergitas APBD dengan dokumen perencanaan secara terpadu dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Meningkatkan akurasi penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
3. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang meraih opini BPK wajar tanpa pengecualian (WTP).
4. Pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Makassar yang tertib atau sesuai dengan SOP pengelolaan aset daerah.
5. SDM, sarana dan prasarana yang memadai bagi aparat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar.

Peluang pengembangan pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar yaitu :

1. Penyelenggaraan penyusunan APBD yang sesuai dengan dokumen perencanaan.
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh BPKA selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) sudah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) yang ada dan telah diverifikasi serta diteliti oleh PPK SKPD.
3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sesuai dengan PP 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

4. Melakukan koordinasi dalam peningkatan pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan barang milik daerah.
5. Menciptkan aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang handal didukung oleh fasilitas dengan segala penunjangnya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Pertumbuhan Belanja Modal, PAD dan Kinerja Keuangan

1. Data Pertumbuhan Belanja Modal

Data pertumbuhan Belanja Modal tiap tahun mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif seperti pada tahun 2013 Belanja modal mengalami kenaikan sebesar Rp 50.837.973.138 atau naik menjadi 18% jika dibandingkan dengan tahun 2012, kemudian Tahun 2014 kembali mengalami penurunan menjadi Rp 181.338.825.028 atau menurun sebesar 58% jika dibandingkan Tahun 2013, Tahun 2015 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp 484.904.298.810 atau naik 155% jika dibandingkan Tahun 2014, dan Pada Tahun 2016 kembali mengalami penurunan sebesar Rp 40.827.233.027 atau 13% jika dibandingkan Tahun 2015. Berikut disajikan dalam Tabel 5.1:

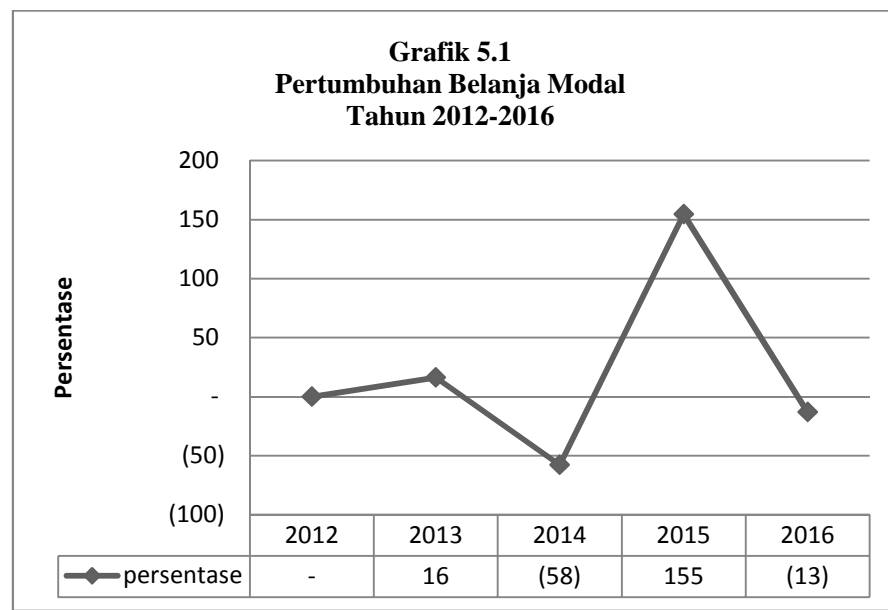
Tabel 5.1
Data Pertumbuhan Belanja Modal
Tahun 2012-2016

Tahun	Belanja Modal	Pertumbuhan	Persentase
2012	318.618.378.909	-	-
2013	369.456.352.047	50.837.973.138	16%
2014	188.122.527.019	(181.333.825.028)	58%
2015	673.026.825.829	484.904.298.810	155%
2016	632.199.592.802	(40.827.233.027)	13%
Total	2.181.423.676.606	313.581.213.893	100%

Sumber : Data PEMDA diolah (2017)

Dari Tabel 5.1

Pertumbuhan Belanja Modal akan terlihat pada garifk 5.1 seperti berikut ini :



2. Data Pertumbuhan PAD

Data pertumbuhan Belanja Modal tiap tahun mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif seperti pada tahun 2013 Belanja modal mengalami kenaikan sebesar Rp 128.525.778.368 atau naik menjadi 31% jika dibandingkan dengan tahun 2012, kemudian Tahun 2014 kembali mengalami penurunan menjadi Rp 111.395.497.126 atau menurun sebesar 27% jika dibandingkan Tahun 2013, Tahun 2015 kembali mengalami penurunan sebesar Rp 97.883.251.512 atau menurun 24% jika dibandingkan Tahun 2014, dan Pada Tahun 2016 kembali mengalami penurunan sebesar Rp

78.705.272.302 atau menurun 19% jika dibandingkan Tahun 2015.

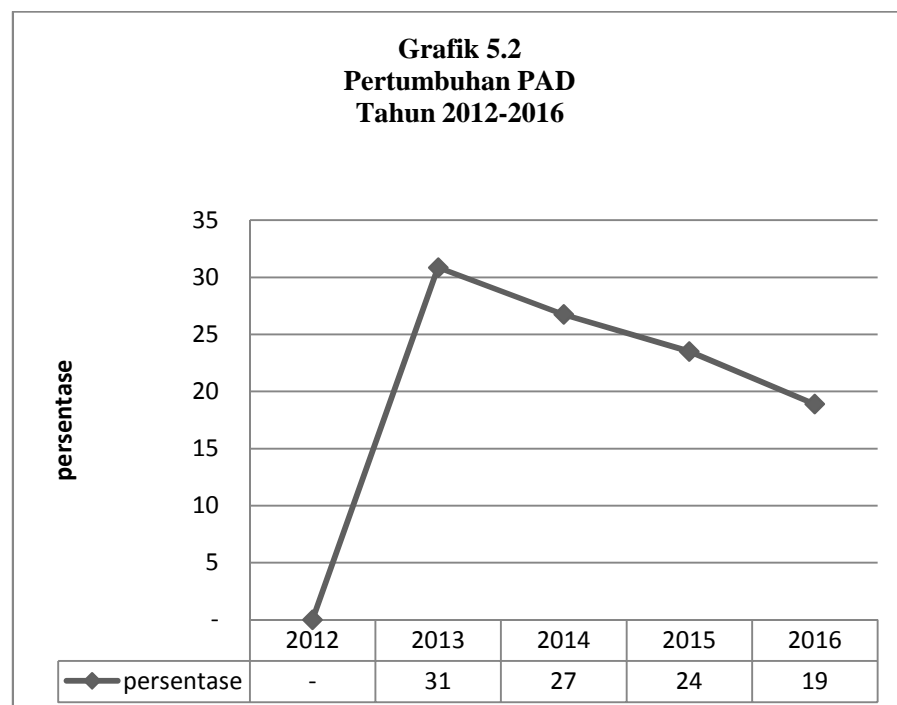
Berikut disajikan dalam Tabel 5.2:

Tabel 5.2
Data Pertumbuhan PAD
Tahun 2012-2016

Tahun	PAD	Pertumbuhan	Persentase
2012	491.067.365.846	-	-
2013	619.593.144.214	128.525.778.368	31%
2014	730.988.641.340	111.395.497.126	27%
2015	828.871.892.852	97.883.251.512	24%
2016	907.577.165.148	78.705.272.296	19%
Total	3.578.098.209.400	416.509.799.302	100%

Sumber : Data PEMDA diolah (2017)

Dari Tabel 5.2 Pertumbuhan PAD akan terlihat pada garifk 5.2 seperti berikut ini:



3. Data Pertumbuhan Kinerja Keuangan

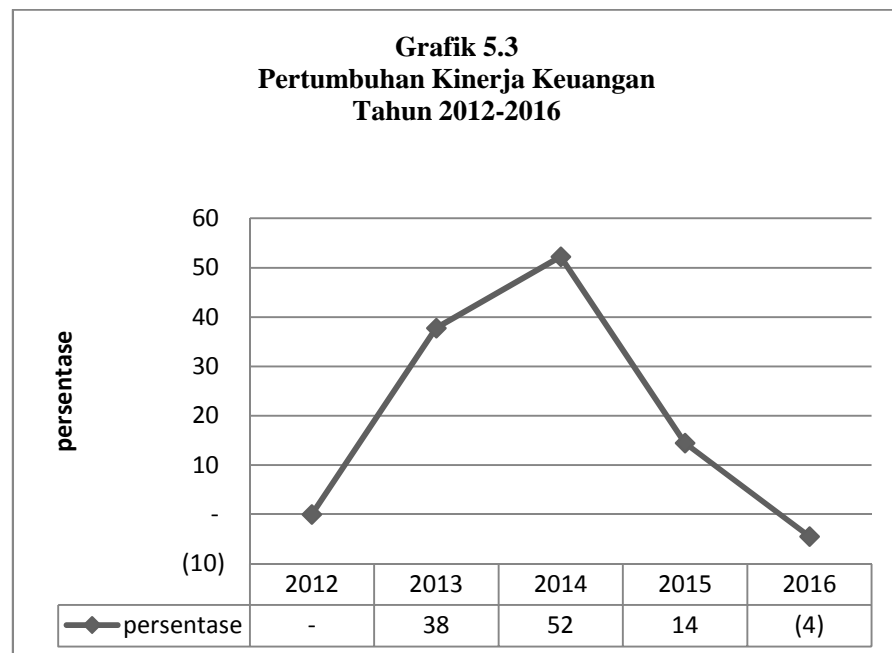
Data pertumbuhan Belanja Modal tiap tahun mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif seperti pada tahun 2013 Belanja modal mengalami kenaikan sebesar Rp 624.856.801.641 atau naik menjadi 38% jika dibandingkan dengan tahun 2012, kemudian Tahun 2014 kembali mengalami kenaikan lagi menjadi Rp 864.177.897.854 atau kenaikan sebesar 52% jika dibandingkan Tahun 2013, Tahun 2015 kembali mengalami penurunan sebesar Rp 239.135.801.854 atau menurun 14% jika dibandingkan Tahun 2014, dan Pada Tahun 2016 kembali mengalami penurunan sebesar Rp 73.938.323.763 atau menurun 4% jika dibandingkan Tahun 2015. Berikut disajikan dalam Tabel 5.3:

Tabel 5.3
Data Pertumbuhan Kinerja Keuangan
Tahun 2012-2016

Tahun	Kinerja Keuangan	Pertumbuhan	Persentase
2012	949.187.145.215	-	-
2013	(324.330.343.574)	624.856.801.641	38%
2014	539.847.553.939	864.177.897.513	52%
2015	778.983.355.794	239.135.801.854	14%
2016	705.045.032.031	(73.938.323.763)	4%
Total	2.648.732.743.405	1.654.232.177.246	100%

Sumber : Data PEMDA diolah (2017)

Dari Tabel 5.3 Pertumbuhan Kinerja Keuangan akan terlihat pada garifk 5.3 seperti berikut ini:



B. Data Hasil Analisis

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan dan PAD sebagai variabel intervensi pada pemerintah daerah kabupaten/kota Makassar tahun 2012-2016.

1. Deskriptif Sampel Penelitian

Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi APBD Pemerintah Daerah kabupaten/kota Makassar dari laporan realisasi anggaran tahun 2012 sampai tahun 2016. Dari laporan realisasi APBD tersebut yang menjadi objek penelitian adalah realisasi belanja modal, pendapatan asli daerah, dan kinerja keuangan yang dilihat dari realisasi APBD dan dibandingkan dengan realisasi APBD dari tahun ke tahun. Maka diperoleh deskriptif statistik data penelitian sebagai berikut pada Tabel 5.4:

Tabel 5.4
Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Z: PAD	7,16E11	1,655E11	5
X1:Belanja Modal	4,36E11	2,088E11	5

Sumber: Data hasil olahan SPSS 21 (2017)

Uji *Descriptive Statistics* bertujuan untuk menguji apakah data yang diuji normal atau tidak. Hasil pengujian normalitas data pada variabel pendapatan asli daerah, terhadap belanja modal pada kinerja keuangan diperoleh hasil *Mean* Z: PAD 7,16E11 dan nilai *Std. Deviation* adalah 1,655E11, Sedangkan X1:Belanja Modal 4,36E11 dengan nilai *Std. Deviation* adalah 2,088E11.

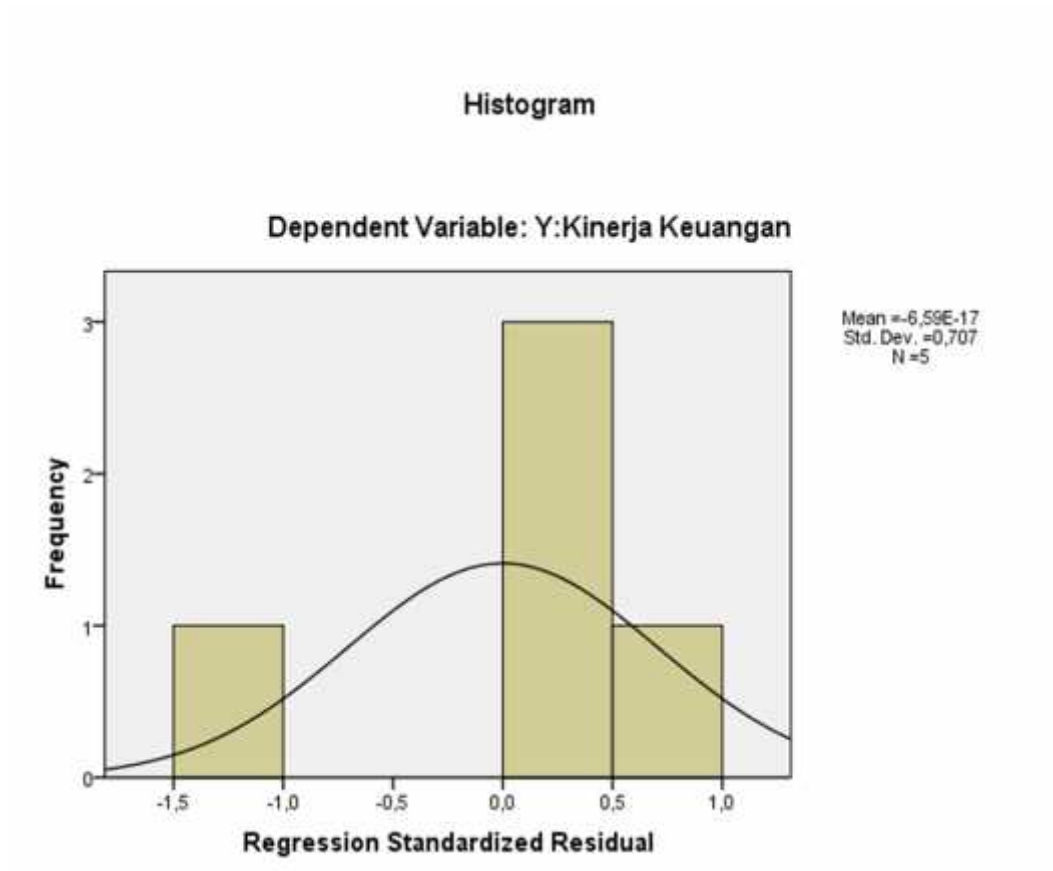
2. Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas terhadap data.

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk melihat normalitas model regresi. pengujian dilakukan dengan menggunakan grafik. terdapat dua grafik, yaitu histogram dan p-p plot. Pada kurva histogram, model memenuhi asumsi normalitas jika bentuk ke kiri maupun ke kanan. berikut ini hasil uji normalitas dengan menggunakan kurva histogram

GRAFIK 5.4
KURVA HISTOGRAM



Sumber : Data hasil olahan SPSS 21 (2017)

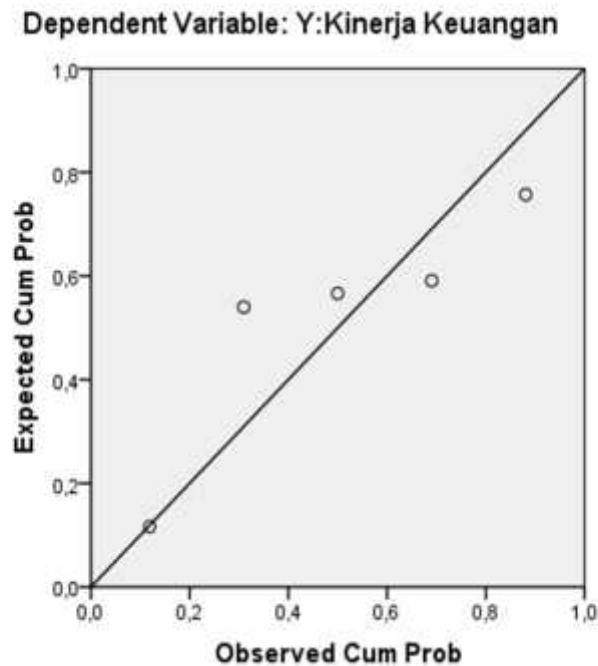
Hasil kurva histogram menunjukkan bahwa bentuk kurva simetris dan tidak melenceng ke kiri maupun ke kanan sehingga berdasarkan kurva histogram, model regresi berdistribusi normal.

b. uji multikolineatitas

Pada grafik p-p plot, model memenuhi asumsi jika titik-titik pada kurva menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonalnya. Berikut ini hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik normal p-p plot

GRAFIK 5.5 NORMAL P-P PLOT

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : data hasil olahan SPSS 21 (2017)

Berdasarkan analisis lebih lanjut dengan menggunakan *Normal Probability Plot of Regression Standardized Residual* Dari gambar grafik di atas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut telah normal

c. Uji Heterokedastisitas

Uji multikolinieritas dimaksudkan untuk menguji apakah dapat melihat ada tidaknya multikolinieritas dengan melihat angka *colinierity statistic* yang ditunjukkan oleh nilai VIF dan nilai *tolerance*, dengan kriteria: jika nilai VIF > dari 10 dan nilai

tolerance < dari 0,1 maka variabel bebas yang ada memiliki masalah multikolinieritas (Lubis, 2007). Hasil pengujian multikolinieritas pada variabel belanja modal, pendapatan asli daerah dan kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel 4:

Tabel 5.5
Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	4,818E11	1,600E11		3,011	,057		
X1:Belanja Modal	,536	,337	,676	1,590	,210	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Z: PAD

Sumber : Data dihasilkan dari SPSS 21(2017)

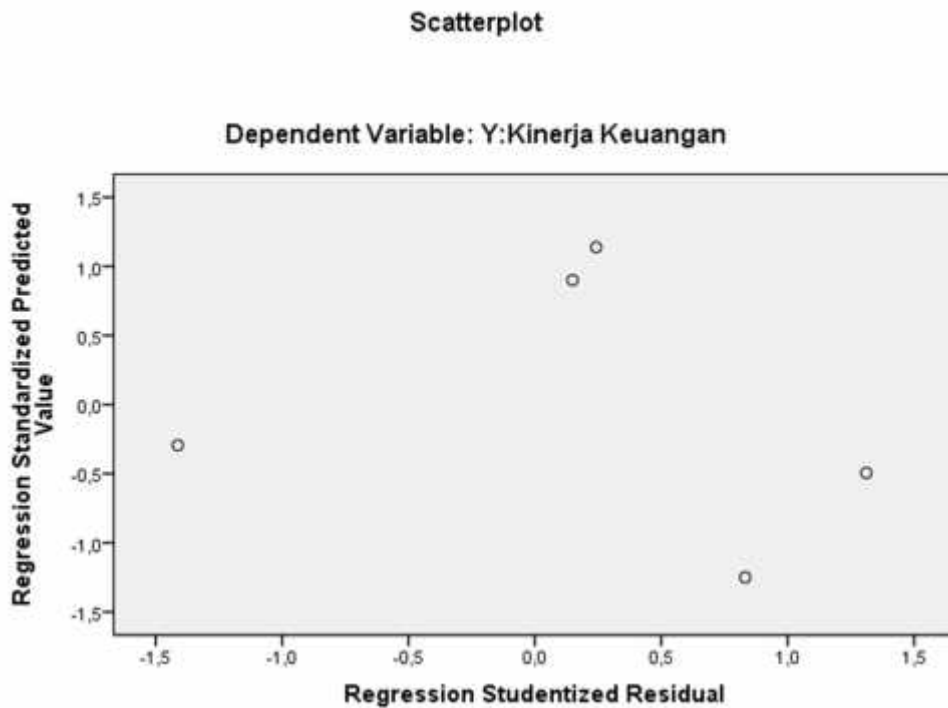
Hasil uji statistik nilai *tolerance* menu nnjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,1 dan begitu juga dengan hasil perhitungan VIF menunjukkan nilai < 10.

d. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi perbedaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit) pada grafik plot (*scatter-plot*) antara nilai prediksi variabel terkait (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika

berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya heterokedastisitas.

GRAFIK 5.6 SCATTERPLOT



Sumber: Data hasil olahan SPSS 21 (2017)

Grafik *scatterplot* pada Gambar 4 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu yang teratur, yang mengindikasikan tidak terjadi heterokedastisitas.

C. Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *path analysis* dengan dua persamaan yaitu:

$$1. \text{ PAD} = b_1 \text{ BM} + e_1$$

Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik dan diperoleh kesimpulan bahwa model sudah dapat digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan Analisis Jalur (*Path Analysis*). Pengujian hipotesis pertama (H1) untuk menguji belanja modal terhadap pendapatan asli daerah. Nilai koefisien *path* dapat dilihat pada Tabel 5.6:

Tabel : 5.6
Uji Regresi Persamaan 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4,818E11	1,600E11		3,011	,057
X1:Belanja Modal	,536	,337	,676	1,590	,210

a. Dependent Variable: Z: PAD

Sumber : Data diperoleh dari SPSS 21 (2017)

Berdasarkan perhitungan *path analysis*, pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah diperoleh koefisien jalur sebesar 0,676 maka tidak dilakukan pengujian signifikan terhadap nilai koefisien *path analysis* tersebut oleh karena $0,676 > 0$, maka penelitian menerima H₁.

$$2. \text{ KK} = b_1 \text{ BM}_{t-1} + b_2 \text{ PAD}_t + e_2$$

Pengujian hipotesis kedua dan ketiga untuk menguji belanja modal melalui pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan dan

belanja modal terhadap kinerja keuangan. Nilai koefisien path dapat dilihat pada Tabel 5.7:

Tabel : 5.7
Uji Regresi Persamaan 2
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,536E11	7,823E11		,196	,862
	X1:Belanja Modal	,296	1,116	,247	,265	,816
	Z: PAD	-,025	1,408	-,017	-,018	,987

a. Dependent Variable: Y:Kinerja Keuangan

Sumber : Data diperoleh dari hasil SPSS 21 (2017)

Berdasarkan perhitungan *path analysis*, pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan diperoleh koefisien jalur sebesar -0,017, maka tidak dilakukan pengujian signifikansi terhadap nilai koefisien *path* tersebut, karena nilai koefisien *path* yang diperoleh adalah nilai oleh kaerana $-0,017 > 0$, maka penelitian ini menerima H_2

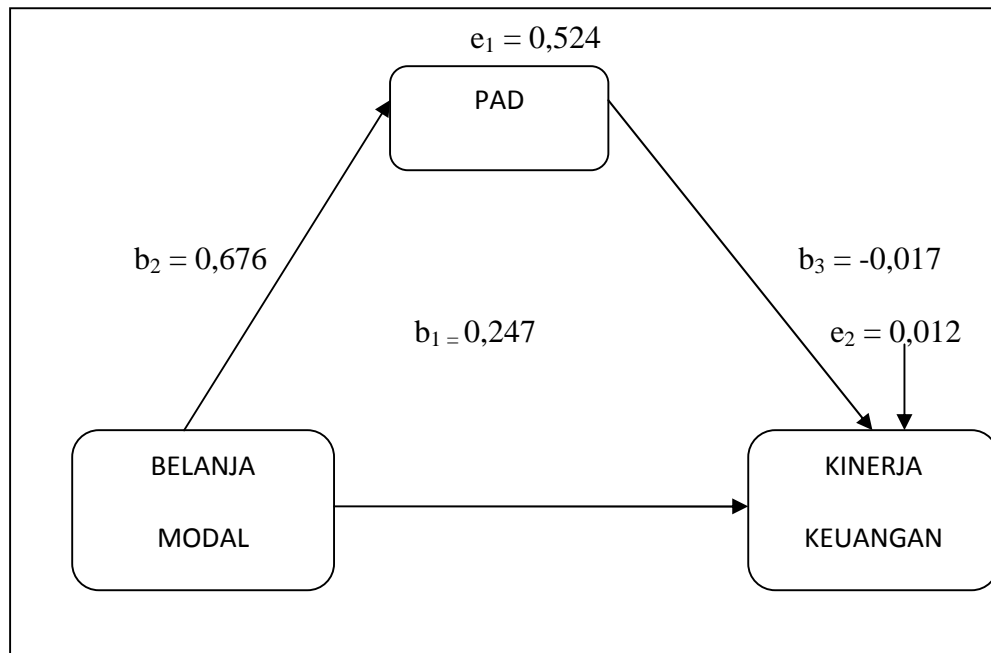
Berdasarkan perhitungan *path analysis* pada Tabel 5.7 dapat dilihat bahwa belanja modal berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap pada kinerja keuangan, sedangkan PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan tetapi belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah. oleh karenanya, maka penelitian ini menolak H_3

Dari hasil *path analysis* dapat dilihat dalam persamaan berikut:

$$\text{PAD} = b_1 \text{BM} + e_1 \dots\dots\dots (1)$$

$$\text{KK} = b_1 \text{BM } t-1 + b_2 \text{PAD } t + e_2 \dots\dots\dots (2)$$

Gambar 5.1
Hasil Dalam Bentuk Diagram Ditunjukkan Pada



Gambar 5.7: Hasil Diagram *Path* Kerangka Koefisien Jalur

Dari gambar 4.4 dapat dilihat bahwa nilai e_1 merupakan hasil dari pengurangan R^2 dengan rumus $e_1 = (1-R^2)^2$, sehingga diperoleh $e_1 = (1-0,276)^2 = (0,724)^2 = 0,524$. Nilai e_2 juga merupakan hasil dari pengurangan dengan R^2 dengan rumus $e_2 = (1-R^2)^2$, sehingga diperoleh $e_2 = (1-0,888)^2 = (0,112)^2 = 0,012$.

D. Pembahasan

1. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis pertama dalam penelitian ini mengenai adanya pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah. Dari Gambar 5.7 dapat dilihat bahwa koefisien dari variabel belanja modal terhadap pendapatan asli daerah (PAD) menunjukkan angka positif. Ini berarti

bahwa semakin besar belanja modal yang dibelanjakan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. hasil pengolahan data dengan menggunakan *path analysis* dapat dilihat pada Tabel 5.8.

Tabel 5.8
Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Secara Langsung Dan Tidak Langsung

Variabel	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Total
BM ke PAD	$(0,676)^2 \times 100\% = 45,6\%$		45,6%
Pengaruh Secara Silmutan			45,6%
Variabel Lain			54,4%

Sumber: Data diolah (2017)

Dari Tabel 7 dapat diketahui bahwa pengaruh variabel belanja modal terhadap pendapatan asli daerah (PAD) secara langsung sebesar 45,6%. Dengan demikian belanja modal berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, sisanya sebesar 54,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diikutkan dalam penelitian ini. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Nugroho (2012) sama-sama hasilnya positif.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Hipotesis kedua dalam penelitian ini mengenai adanya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan. Dari gambar 5.7 dapat dilihat bahwa koefisien dari pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan adalah positif. Hal ini berarti semakin tinggi pendapatan asli daerah akan sangat mendukung pertumbuhan kinerja keuangan. Besarnya pengaruh langsung pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan adalah

sebesar $(-0,012)^2 \times 100\% = 0,028$, Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Florida (2006).

3. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Melalui Pendapatan Asli Daerah.

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini mengenai adanya pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah. Dari Gambar 5.7 dapat dilihat bahwa koefisien dari variabel belanja modal terhadap kinerja keuangan menunjukkan angka negatif. Ini berarti belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan tetapi belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengolahan data dengan menggunakan path analysis pada Tabel 5.9:

Tabel 5.9
Pengaruh Belanja Modal Terhadap kinerja Keuangan Melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) Secara Langsung Dan Tidak Langsung

Variabel	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Total
BM ke KK	$(0,247)^2 \times 100\% = 24,7\%$		24,7%
PAD ke KK	$(-0,017)^2 \times 100\% = 0,028\%$		
BM ke KK Melalui PAD		$2(0,247 \times -0,017 \times 0,676) \times 100\% = -0,56\%$	-5,6%
Pengaruh Secara Simultan			19,1%
Variabel Lain			75,3%

Sumber : Data diolah (2017)

Dari Tabel 8 dapat diketahui bahwa pengaruh variabel belanja modal terhadap kinerja keuangan secara langsung sebesar 24,7% pengaruh variabel pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan secara langsung sebesar 0,028% Pengaruh tidak langsung variabel belanja modal

terhadap kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 5,6%. jadi, total pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung sebesar 91,1% (merupakan penjumlahan antara $(24,7\% + 0,028\% - 5,6\%)$). Dengan demikian belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah, sisanya sebesar 75,3% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar penelitian. Hasil ini selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nugroho (2012) yaitu Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening.

Dari Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan meningkatnya belanja modal berarti pemerintah daerah telah melakukan upaya peningkatan pembangunan infrastruktur untuk dapat digunakan oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan produktifitas masyarakat dalam melakukan pekerjaannya, dengan ini masyarakat dapat membayar segala macam bentuk pajak dan retribusi daerah yang nantinya akan meningkatkan pendapatan asli daerah, peningkatan pendapatan asli daerah ini juga yang kemudian akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi tuntutan masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada analisis data, uji hipotesis, serta pembahasan penelitian maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

bahwa belanja modal berpengaruh pada pendapatan asli daerah (PAD) begitupun sebaliknya dengan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dapat dilihat dari koefisien yang ditunjuka pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan adalah positif. Dan belanja modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, namun belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Nugroho, 2012.

B. SARAN

Dari hasil penelitian maka dapat disarankan:

1. Kepada peneliti selanjutnya dapat memilah jumlah belanja modal yang digunakan pemerintah untuk membiayai pemebangunan infrastruktur yang dapat menghasilkan PAD dengan pemebangunan infrastruktur yang tidak dapat mengahasilkan PAD.
2. Memperluas obyek penelitian yang tidak terbatas pada kabupaten/kota Makassar saja dengan menambah kabupaten/kota Provinsi lain sebagai

sampel, sehingga memungkinkan adanya perbandingan belanja modal yang mempengaruhi kinerja keuangan.

C. KETERBATASAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya menggunakan data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kota Makassar selama 5 tahun yaitu tahun 2012-2016 untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah dan dampaknya pada kinerja keuangan daerah.
2. Menggunakan data rentang waktu yang pendek yaitu hanya pada pendapatan asli daerah dan kinerja keuangan. Ini menyebabkan data-data pada penelitian ini kurang memiliki ketepatan atau keakuratan sehingga hasilnya kurang sempurna

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari, 2007. *Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah*. Simposium Nasional Akuntantasi IX. Padang
- Batubara, Dian Nofrina, 2009. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Propinsi Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara.
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi sektor publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salembah Empat.
- Halim, Abdul, 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Salembah Empat.
- Halim, Abdul, 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugroho, Fajar, 2012. *Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah)*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Solikin, Ikin. 2007. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat. *Jurnal Eksklusif Vol.4 No.4*. Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Slipi. Jakarta.
- Sumarmi, 2008. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas PGRI.
- Sumarjo, Hendro. 2010. *Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja Keuangan Pemerintah daerah (studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia)*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Agung, Laksana S. Belanja Modal Pemerintah Tak Dorong Pertumbuhan Eonomi. Melalui <<http://www.kompas.com.htm>>[15/09/13].

L

A

M

P

I

R

A

N

RIWAYAT HIDUP



Devi Apriliyanti lahir di Dompu kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 05 april 1995. Merupakan buah hati dari pasangan Julkarnain dan Nuraini hidayati, anak pertama dari dua bersaudara. Penulis memulai pendidikan di SD 04 Hu'u pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2006. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Daerah Hu'u dan lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Hu'u dan lulus pada tahun 2013. Tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Program Studi S1 (Strata satu).